

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu Gender adalah isu global yang memainkan peran signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Sangat disayangkan, isu gender seringkali dikesampingkan dalam diskusi *mainstream* padahal gender adalah hal yang paling fundamental dalam diri seseorang. Di satu sisi, karena jarang diperbincangkan, banyak orang yang akhirnya menaruh salah kaprah antara perbedaan gender dan seks (jenis kelamin). Perbedaan yang dasar ini perlu diketahui sehingga salah kaprah dari arti keduanya dapat diluruskan dan agenda untuk membangun masyarakat yang melek isu gender dapat tercapai. Seperti yang ditulis oleh Mansour Fakih dalam bukunya “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, pemahaman tentang perbedaan gender dan seks (jenis kelamin) akan memudahkan masyarakat untuk menyadari bahwa dalam struktur bermasyarakat sehari-hari telah terjadi yang disebut dengan ketidakadilan gender atau *gender inequalities*.<sup>2</sup>

Kata gender merupakan kata serapan yang masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia setelah dipinjam dari bahasa Inggris. Namun bahkan dalam

---

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Permasalahan Gender Itu Milik Laki-Laki Dan Perempuan” (Yogyakarta, 2015), last modified 2015, accessed February 23, 2023, <https://www.umy.ac.id/permasalahan-gender-itu-milik-laki-laki-dan-perempuan>.

<sup>2</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Kedua. (Yogyakarta: INSISTPress, 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga tidak memberikan pengertian yang jelas, yang mampu membedakan gender dan seks (jenis kelamin). Jika seks (jenis kelamin) adalah perbedaan makhluk hidup ke dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan dengan struktur penyifatan yang berbeda secara biologis, maka gender adalah suatu konstruksi sosial dan budaya yang dilekatkan terhadap kaum laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Kaum perempuan (feminin) sering kali diidentikan dengan sifat lemah lembut, makhluk yang emosional, dan cantik sedang kaum laki-laki (maskulin) sering kali diasosiasikan dengan sifat kuat, perkasa, dan makhluk yang lebih cenderung menggunakan logika atau rasional.<sup>4</sup> Pelakatan sifat-sifat ini sebenarnya variatif dan dinamis atau berubah-ubah. Artinya, kaum perempuan tidak melulu emosional namun juga bisa rasional begitu pun sebaliknya kaum laki-laki juga dapat bersikap lemah lembut. Namun seiring berjalannya waktu, sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial ini kemudian dipaksa untuk melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Seolah-olah sifat-sifat tadi bersifat biologis atau tidak bisa dirubah sama sekali. Oleh karena itu kaum laki-laki sedari kanak-kanak diasuh dan dibesarkan untuk tidak boleh gampang menangis dan emosional sedangkan kaum perempuan dibesarkan dengan cara sebaliknya karena telah

---

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Analisis Gender Dalam Pengelolaan Konflik Sumberdaya Hutan," *E-Learning Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, last modified 2015, accessed February 19, 2023, [https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod\\_resource/content/1/analisis\\_gender/index.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis_gender/index.html).

<sup>4</sup> Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 5–6.

dilekatkan secara sosial dan budaya untuk tumbuh menjadi makhluk yang emosional dan lemah lembut.<sup>5</sup>

Pemahaman yang kurang akan perbedaan ini membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat, dimana adanya kekeliruan yang menyebabkan kaum laki-laki dan perempuan harus terkurung dalam konstruksi sosial yang tidak masuk akal dan membatasi mereka untuk sampai pada potensi diri yang maksimal karena terhalang penjara tak masuk akal tersebut. Penggunaan frasa seperti kodrat pria dan kodrat wanita, dimana pria kodratnya adalah bekerja mencari nafkah sedangkan kodrat wanita hanyalah mengasuh dan mendidik anak, dijadikan sebagai patokan oleh masyarakat dan seolah tidak dapat dirubah lagi. Padahal perempuan juga bisa bekerja, dan laki-laki juga dapat mengasuh dan mendidik anak. Sejatinya kodrat merupakan hal yang ditetapkan secara permanen dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana tidak dapat dirubah ataupun ditolak, seperti hanya perempuan saja yang memiliki kemampuan untuk mengandung dan melahirkan dan hanya laki-laki saja yang memiliki sperma.<sup>6</sup>

Dalam bingkai Hubungan Internasional, gender maskulin atau yang sering diasosiasikan kepada kaum laki-laki memiliki sifat yang kuat, memaksa, rasional bahkan cenderung dingin dan tidak peduli pada sesama manusia, dapat memberdayakan diri sendiri, dan diasumsikan dapat menjadi seorang pemimpin bagi orang banyak. Berbanding terbalik dengan gender maskulin, gender feminin

---

<sup>5</sup> Chimamanda Ngozi Adichie, *A Feminist Manifesto: Kita Semua Harus Menjadi Feminis*, ed. AD Saputra, Pertama. (Sleman: Odyssee Publishing, 2019), 16–17.

<sup>6</sup> Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 4–5.

diasosiasikan dengan sifat kurang tegas, tidak agresif, terlalu bergantung, senang bergaul dengan sesama yang lain, sensitif sehingga sangat emosional jika sedang dihadapi suatu isu, dan lebih fokus pada ranah privat.<sup>7</sup> Gender yang sudah disalahartikan dan diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu menyebabkan gender feminin yang dilekatkan kepada perempuan sering kali menjadi bawahan (*subordinate*) daripada gender maskulin (daripada kaum laki-laki).<sup>8</sup> Sehingga, dalam ranah Hubungan Internasional pun, kaum perempuan sering kali tidak dipentingkan kebutuhannya. Hal ini kemudian tercermin dari banyaknya analisis ekonomi politik internasional yang tidak mementingkan perempuan dan kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat.

Pengkotak-kotakan berdasarkan gender yang kemudian disalahartikan sebagai sebuah kodrat bagi laki-laki dan perempuan akhirnya menciptakan suatu kehidupan sosial budaya yang tidak adil dan merugikan keduanya. Hal inilah yang disebut dengan ketidakadilan gender atau *gender inequalities*.<sup>9</sup> Ketidakadilan gender sering kali condong untuk merugikan kaum perempuan, dimana membuat mereka rentan terhadap kekerasan baik secara fisik maupun verbal ataupun kekerasan budaya ataupun struktural.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, Fifth Edit. (Glenview, Illinois: Pearson Education, Inc., 2012).

<sup>8</sup> Ibid., 362–363.

<sup>9</sup> Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 8–10.

<sup>10</sup> Ibid., 12–15.

Melihat kegentingan ini, isu gender kemudian dilihat sebagai hal yang perlu diperhatikan dan dicapai. Sehingga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) dianggap penting. Kesejahteraan perempuan yang selalu menjadi warga negara nomor dua membuat PBB memasukan Tujuan kesetaraan gender atau *gender equality* dalam salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dikelola dalam lingkup kerja UN Development Programme (UNDP).<sup>11</sup> Lahirnya UN Women juga menjadi salah satu langkah untuk membantu dan mempercepat agenda UNDP ini.<sup>12</sup> Menurut PBB, kesetaraan gender tidak hanya sebuah hak asasi manusia namun juga merupakan indikator penting agar seluruh bangsa dapat hidup dalam damai, makmur, sejahtera, dan juga berkelanjutan.<sup>13</sup> Dalam lingkup UNDP sendiri, tercatat pada Laporan Tahunan 2019 yang telah dirilis menunjukkan bahwa UNDP telah menjadi organisasi yang sudah seimbang dalam hal gender.<sup>14</sup> Untuk memaksimalkan penerapannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat global, UNDP

---

<sup>11</sup> World Economic Forum, 2018 *The Global Gender Gap Report*, World Economic Forum, 2019.

<sup>12</sup> UN Women, "About UN Women," *UN Women*, last modified 2010, accessed February 23, 2023, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women#:~:text=UN Women is the United,on meeting their needs worldwide>.

<sup>13</sup> United Nations, "No Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls," *UN.Org*, accessed February 20, 2023, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.

<sup>14</sup> UNDP, "UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME: 2019 Annual Report," 2019.

mengembangkan target-target terperinci yang kemudian disandur oleh berbagai negara sebagai cara untuk melihat angka kesetaraan gender di negara tersebut.<sup>15</sup>

Dalam sebuah ringkasan laporan UNDP *Gender Equality Strategy 2018-2021*, UNDP mencatat 4 poin yang menjadi area prioritas karena kepentingannya yang mendesak dan fundamental. Empat hal tersebut antara lain: menghapuskan hambatan struktural terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan termasuk pekerjaan tidak berbayar, mencegah dan merespon cepat terhadap kekerasan berdasarkan gender, mempromosikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam jabatan-jabatan pengambil keputusan, dan menguatkan strategi cepat tanggap gender dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan krisis (yang diakibatkan oleh konflik dan bencana).<sup>16</sup> Selain itu, untuk mewujudkan kesetaraan gender, UNDP juga mempromosikan kepemimpinan untuk kesetaraan gender di antara manajer senior dengan memastikan perwakilan gender yang seimbang dalam pertemuan tingkat tinggi dan konferensi atau acara yang diselenggarakan UNDP dengan mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pidato dan pernyataan publik.<sup>17</sup>

Indonesia sendiri sejak ikut menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) ke

---

<sup>15</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Metadata Indikator Edisi II: Pilar Pembangunan Sosial*, ed. Arifin Rudiyanto (Jakarta: Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), 190.

<sup>16</sup> UNDP, *Gender Equality Strategy 2018-2021* (New York, 2018), 1, [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP\\_GES\\_2pager\\_060219.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP_GES_2pager_060219.pdf).

<sup>17</sup> *Ibid.*, 2.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi masalah gender yang terjadi.<sup>18</sup> Ratifikasi ini mengikuti serangkaian sidang yang dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidang yang dilakukan pada 18 Desember 1979. Selain CEDAW, Indonesia juga menunjukkan keseriusannya dengan ikut berkomitmen terhadap *Beijing Platform of Action* yang dimana juga memberikan panduan untuk menghilangkan hambatan yang menghambat perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik secara penuh. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang selaras dengan Tujuan Kesetaraan Gender yang dikeluarkan oleh UNDP, juga ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang dimana memfokuskan areanya kepada pengarusutamaan gender.<sup>19</sup>

Kendati demikian, di bidang politik misalkan, melalui catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) mengenai indeks keterwakilan perempuan dalam jabatan publik di 33 provinsi di Indonesia mendapat catatan “belum terukur dengan baik” dikarenakan data yang ada masih sangat kecil lingkupnya, dimana jabatan publik yang dapat dihimpun hanya mencakup dalam lembaga legislatif saja.<sup>20</sup> Terdapat indeks partisipasi perempuan

---

<sup>18</sup> UNDP Indonesia, “Focus Area: Gender Equality in Indonesia,” accessed February 20, 2023, <https://www.undp.org/indonesia/gender-equality>.

<sup>19</sup> Bappenas, “Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025,” *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2005): 48, [https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP\\_2005-2025.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf).

<sup>20</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Indeks Kesetaraan Dan Keadilan Gender (IKKG) Dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal*, 2012, 28, [https://www.bappenas.go.id/files/9013/5039/6528/ikkg-ikpug-final-cetak-2012-lowres\\_\\_20130415144402\\_\\_3772\\_\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9013/5039/6528/ikkg-ikpug-final-cetak-2012-lowres__20130415144402__3772__0.pdf).

dan laki-laki di politik dimana indeks perempuan hanya berada di angka 0,193 berbanding jauh dengan laki-laki yang memiliki angka 0,807 pada tahun 2010.<sup>21</sup> Pencapaian dalam aspek keterwakilan dalam jabatan publik pada perempuan hanya berada di angka 19,3% sedangkan laki-laki memiliki persentase yang hampir 8 kali lipat yaitu 80,7%.<sup>22</sup> Padahal dalam CEDAW yang telah diratifikasi tertulis butir bahwasanya negara dapat memberikan jaminan bagi perempuan agar mampu mendapatkan kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam pemilu, jabatan publik yang strategis, dan organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO/LSM). Sedikitnya partisipasi perempuan dalam politik atau jabatan pemangku dan pembuat kebijakan sangat disayangkan. UN Women mencatat bahwa dengan meningkatnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam parlemen akan menaikkan perhatian kepada masalah perempuan.<sup>23</sup>

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di tahun 2017, memaparkan angka-angka miris mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan. Tercatat bahwa sejak 2010, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat terus menerus setiap tahun. Bahkan pada tahun 2011-2012 mengalami

---

<sup>21</sup> Ibid., 28–29.

<sup>22</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Indeks Kesetaraan Dan Keadilan Gender (IKKG) Dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal*.

<sup>23</sup> UN Women, “Political Participation of Women,” <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/political-participation-of-women>.



peningkatan dengan angka paling tinggi yaitu 35%.<sup>24</sup> Komnas Perempuan kemudian menarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi di ranah rumah tangga atau KDRT.<sup>25</sup> Selain KDRT, kekerasan yang dialami oleh perempuan juga sering terjadi dalam hubungan pacaran yang mana masih belum memiliki payung hukum yang jelas.<sup>26</sup> Data-data ini kemudian menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dari orang terdekat atau yang dikenal korban. Mirisnya, kasus-kasus ini semakin marak terjadi maka semakin kompleks dan terjadi lebih cepat daripada negara mampu merespon dan membantu korban kekerasan.

Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu dari beberapa provinsi yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Data yang disampaikan oleh Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur per tahun 2015, menunjukkan bahwa ada setidaknya 600 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun tersebut (belum dipisah antara kekerasan seksual dan kekerasan fisik).<sup>27</sup> Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat

---

<sup>24</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2017: Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016" (2017), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2016>.

<sup>25</sup> Ibid., 3.

<sup>26</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2017: Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016."

<sup>27</sup> IndonesiaTimur.co, *Kekerasan Pada Perempuan Di NTT Tahun Ini Mencapai 600 Kasus* (Kupang, 2015), <https://indonesiatimur.co/2015/11/25/kekerasan-pada-perempuan-di-ntt-tahun-ini-mencapai-600-kasus/>.

yang bergerak menangani masalah Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur, Rumah Perempuan mencatat dalam tahun 2016-2021 terdapat 1.469 kasus (565 kasus KDRT, 232 kasus anak berhadapan dengan hukum, 201 kasus kekerasan seksual, 130 kasus anak membutuhkan perlindungan khusus).<sup>28</sup> Angka ini dipaparkan oleh Libby Sinlaeloe dengan menambahkan bahwa kasus yang tercatat masih terbilang sedikit mengingat pengetahuan, kesadaran, dan keberanian korban untuk melaporkan masih sangat rendah. Dari kasus-kasus yang ditangani oleh Libby dan Rumah Perempuan, faktor lain yang mempengaruhi korban untuk tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dialami adalah masih tabunya masyarakat NTT dalam membicarakan kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga di mana korban (perempuan/istri) karena hal tersebut dianggap aib dan harus dijaga kerahasiaannya dan juga agar tidak terjadi perceraian.<sup>29</sup> Jika pun ada laporan yang masuk, biasa korban hanya berniat menggunakan laporan tersebut sebagai sebuah ancaman agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Sehingga tidak terlalu banyak laporan yang akhirnya diusut tuntas karena sudah lebih dulu ditarik dan diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>30</sup> Selain budaya diam tersebut, faktor

---

<sup>28</sup> Timex Kupang, *Korban Kekerasan Seksual Belum Enam Tahun Terakhir, Rumah Perempuan Kupang Tangani 1.469 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Diberikan Keadilan* (Kupang, 2022), <https://timexkupang.fajar.co.id/2022/12/07/enam-tahun-terakhir-rumah-perempuan-kupang-tangani-1-469-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/>.

<sup>29</sup> Ibid., 2.

<sup>30</sup> Dewi Indah Susanty and Nur Julqurniati, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur," *Sosio konsepsia* 8, no. 2 (2019), <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1661/934>.

lainnya adalah layanan penanganan kekerasan yang masih terbatas, dan biaya untuk melapor cukup tinggi karena wilayah yang terpencil.

Kehadiran Wahana Visi Indonesia sebagai salah satu dari banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mencoba membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi suatu oase segar dalam percobaan menuju masyarakat yang meleak isu gender dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Melabeli diri sebagai organisasi kemanusiaan Kristen, Wahana Visi Indonesia datang untuk membantu mengusahakan transformasi kehidupan perempuan, anak, dan kaum marjinal lainnya untuk menjadi kelompok masyarakat yang mandiri.<sup>31</sup> Dalam perbantuannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wahana Visi mengklaim bahwa telah melaksanakan program di 18 kota/kabupaten di Nusa Tenggara Timur antara lain: Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Kupang, Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, dan Belu. Persebaran ini tercatat sebagai persebaran program paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pelayanan Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur kurang lebih telah terjadi selama 2 dekade. Salah satunya adalah daerah Sumba Timur yang sudah dilayani oleh Wahana Visi Indonesia selama 24 tahun per 2022.<sup>32</sup> Kehadiran Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur yang

---

<sup>31</sup> Wahana Visi Indonesia, "Wahana Visi Indonesia," accessed February 21, 2023, <https://wahanavisi.org/id/tentang/tentang-kami>.

<sup>32</sup> Ryan Nong and Pos Kupang, "Setelah 24 Tahun Melakukan Intervensi, WVI Tutup Area Program Di Sumba Timur Artikel Ini Telah Tayang Di Pos-Kupang.Com Dengan Judul Setelah 24 Tahun Melakukan Intervensi, WVI Tutup Area Program Di Sumba Timur," n.d.,

sudah lebih dari dua dekade, menunjukkan adanya masalah yang belum terselesaikan di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya yang berkaitan dengan gender. Apalagi persebaran pelayanan Wahana Visi Indonesia yang terbanyak di Nusa Tenggara Timur dikarenakan provinsi ini termasuk provinsi kepulauan yang memiliki banyak daerah yang mesti diperhatikan. Sehingga ketika hadir di Nusa Tenggara Timur, organisasi ini menunjukkan keseriusannya dalam bekerja, melayani, dan membangun masyarakat. Hal inilah yang akan penulis analisis yaitu peran dari Wahana Visi Indonesia dalam menangani isu gender terkhususnya ketidaksetaraan gender yang masih marak terjadi di Nusa Tenggara Timur dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi internasional untuk membantu Nusa Tenggara Timur mencapai kesetaraan gender seperti dalam tujuan nomor 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis hendak menunjukkan pentingnya Tujuan SDGs Nomor 5 yaitu kesetaraan gender, sebagai salah satu faktor untuk menuju suatu kehidupan yang damai, makmur, sejahtera, dan juga berkelanjutan. Terkhusus di wilayah Republik Indonesia yang masih tinggi angka kekerasan terhadap perempuan seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu area fokus Wahana Visi Indonesia untuk melakukan

---

<https://kupang.tribunnews.com/2022/09/09/setelah-24-tahun-melakukan-intervensi-wvi-tutup-area-program-di-sumba-timur?page=2>.

pelayanannya dalam membantu memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koneksi dan jangkauan Wahana Visi Indonesia dirasa dapat memberikan perubahan terhadap keadaan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu, penulis juga akan menilik perkembangan dan pemajuan angka kesetaraan gender yang dilakukan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak kehadiran dari Wahana Visi Indonesia. Dengan topik yang sudah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apa saja peran Wahana Visi Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana peran Wahana Visi Indonesia dapat mendukung implementasi SDGs Nomor 5 yaitu kesetaraan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan bahasan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pengetahuan akan gender dan isu yang berkaitan di dalamnya terhadap kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan setiap kebijakan serta tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nomor 5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kesetaraan gender. Apalagi walau sudah hampir 44 tahun sejak diratifikasinya CEDAW, Indonesia terkhususnya Nusa Tenggara Timur yang masih memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memaparkan pentingnya lembaga swadaya masyarakat sebagai aktor

non-negara yang juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan sangat dibutuhkan kehadirannya untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan nomor 5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap para pembaca dapat mengetahui dan meningkatkan wawasan tentang isu gender terkhususnya menggunakan teori Feminisme dalam Hubungan Internasional. Feminisme sebagai kajian gender pada kenyataannya masih sering diabaikan sebagai tolak ukur dikarenakan dirasa terlalu mempersoalkan masalah di ranah pribadi. Padahal Hubungan Internasional sendiri merupakan studi yang kompleks yang membutuhkan banyak persepsi yang sekira mampu menyelesaikan konflik dan melanggengkan perdamaian. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, makin banyak peneliti-peneliti lainnya yang tertarik untuk melihat fenomena Hubungan Internasional menggunakan kacamata Feminisme.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi atas lima bagian yang dituliskan secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam BAB I, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang dari topik yang dipilih yaitu “Peran Wahana Visi Indonesia Dalam Mendukung Implementasi Sdgs Nomor 5 di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Penulis juga akan menunjukkan rumusan masalah yang ditemukan serta tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

**BAB II:** Pada bagian ini akan memaparkan tentang tinjauan pustaka yang ditemukan oleh peneliti dan landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka, peneliti akan mencoba memaparkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini. Juga akan dijelaskan tentang landasan teori yang menjadi asumsi dasar untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

**BAB III:** Dalam BAB III ini, penulis akan menunjukkan metode penelitian yang dipilih untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan perbandingan analitik dan analisis naratif. Metode ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dari studi literatur, studi daring, data wawancara, dan data yang diberikan dari narasumber.

**BAB IV:** Bagian ini akan berisi tentang Peran Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi isu gender yang terjadi dan hasil apa saja yang ditunjukkan dalam peranan tersebut.

**BAB V:** Dalam bab terakhir ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Penulis juga akan memberikan pendapat dan saran mengenai peran dari Wahana Visi Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengoptimalan kontribusinya dalam mencapai Tujuan dari Tujuan Pembangunan nomor 5 yaitu kesetaraan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur.